

BAPPEDA PROVINSI NTT

PENYUSUNAN RENSTRA SKPD

Penyusunan RENSTRA SKPD PROVINSI NTT 2013 - 2018

SISTEMATIKA RENSTRA SKPD

BAB I. PENDAHULUAN

- 1. Latar Belakang**
- 2. Landasan Hukum**
- 3. Maksud Dan Tujuan**
- 4. Sistematika**

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD

- 1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD**
- 2. Sumber Daya SKPD**
- 3. Kinerja Pelayanan SKPD**
- 4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD**

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD**
- 2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**
- 3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota**
- 4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**
- 5. Penentuan Isu-isu Strategis**

SISTEMATIKA RENSTRA SKPD (Lanjutan)

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

- 1. Visi dan Misi SKPD**
- 2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD**
- 3. Strategi dan Kebijakan**

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

MENYUSUN BAB 1 & BAB 2 RENSTRA SKPD

Substansi Teknis

Menyusun BAB 1. Pendahuluan

Daftar Isi – Bab 1

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

1.1. Latar Belakang

- Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra SKPD, fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja SKPD.

TIPS!!!! Lihat dan sarikan dari Permendagri 54/2010 Lampiran IV khususnya Bagan Alir penyusunan dan materi presentasi sesi 1

1.2. Landasan Hukum

- undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum	Substansi
UNDANG - UNDANG	<ol style="list-style-type: none">1. UU Nomor 25 tahun 2004 ttg Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)2. UU Nomor 17 tahun 2003 ttg Keuangan Negara3. UU Nomor 32 tahun 2004 ttg Pemerintahan Daerah4. UU Nomor 33 tahun 2004 ttg Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah5. UU lainnya yg berkaitan dengan tupoksi SKPD
PERATURAN PEMERINTAH	<ol style="list-style-type: none">1. PP Nomor 58 tahun 2005 ttg Pengelolaan Keuangan Daerah2. PP Nomor 65 tahun 2005 ttg Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal3. PP Nomor 8 tahun 2008 ttg Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
PERATURAN DAERAH	<ol style="list-style-type: none">1. Perda ttg RPJMD Kab. Lembata2. Perda ttg Kewenangan3. Perda ttg Organisasi Kab. Lembata

1.3. Maksud dan Tujuan

	Arti Kata
MAKSUD	Niat atau Kehendak
TUJUAN	<ol style="list-style-type: none">1. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk memecahkan permasalahan;2. Rumusan pernyataan tujuan biasanya disusun menjadi suatu kalimat positif yang ringkas;3. Pernyataan tujuan biasanya dimulai dengan menggunakan suatu kata kerja (<i>verb</i>) yang menjelaskan arah keinginan/preferensi

1.4. Sistematika Penulisan

JANGAN !!!!!

- Ditulis seperti membuat daftar isi dokumen:

Sistematika Penulisan

1. Pendahuluan;
 1. Latar belakang
 2. Dasar hukum
 3. Dst.....
2. Gambaran Pelayanan
 1. Tupoksi skpd
 2. Dst.....

SEBAIKNYA !!!!!

- Dinarasikan dgn penekanan pd pokok bahasan pd setiap Bab:

Sistematika Penulisan

Bab 1. Pendahuluan: Memuat ttg latar belakang penulisan serta maksud dan tujuan renstra ini;

Bab 2. Gambaran Pelayanan: Memuat ttg pelayanan skpd yg dilaksanakan sesuai tupoksinya serta sumber daya yang tersedia. Dst.....

Akhir Bab 1

Untuk bab 1 sebaiknya tidak perlu panjang-panjang!!!!

3-5 halaman cukup

Menyusun Bab 2 – Gambaran SKPD

Daftar Isi BAB 2

2.1. Tupoksi dan Struktur SKPD

2.2. Sumber Daya SKPD

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

**2.4. Tantangan dan Peluang
Pelayanan SKPD**

2.1. Tupoksi dan Struktur SKPD

- Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan SKPD, struktur organisasi SKPD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala SKPD. Uraian tentang struktur organisasi SKPD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana SKPD (proses, prosedur, mekanisme).

Lihat dari Perda ttg Organisasi dan Perangkat Daerah !!!

2.2. Sumber Daya SKPD

- Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki SKPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

Lihat dari LAKIP SKPD atau Laporan Tahunan SKPD!!!

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

- Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2 Tabel penting di bagian ini
Tabel 2.1. Pencapaian kinerja SKPD
Tabel 2.2. Anggaran dan realisasi

Indikator yg digunakan

1. Indikator kinerja SPM, jika SKPD telah memiliki SPM;
2. Indikator kinerja yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. SKPD menggunakan Lampiran I peraturan menteri ini sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD berkenaan;
3. Indikator yang telah dikembangkan SKPD secara mandiri berdasarkan hasil analisis standar kebutuhan pelayanan sesuai tugas dan fungsi SKPD tersebut; dan
4. Indikator *Millennium Development Goals* (MDGs) ataupun indikator lain yang telah diratifikasi oleh pemerintah yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD berkenaan.

Pengukuran Kinerja

Jika SKPD belum memiliki renstra terdahulu atau tidak memiliki indikator terukur dalam renstranya, maka skpd dapat menggunakan indikator yg ada dalam permendagri 54/2010 atau indikator lainnya untuk menunjukkan kondisi yg ada

Sumber Data

- **Anggaran** : Perda APBD pd tahun yg bersangkutan;
- **Realisasi** : Nota perhitungan pd tahun yg bersangkutan

Uraian adalah Struktur APBD yg diisi sesuai kewenangan yg ada pd SKPD yg bersangkutan

Uraian sesuai kewenangan SKPD

Uraian (Struktur APBD)	Keterangan
Pendapatan - PAD	Khusus SKPD penghasil PAD
Belanja	
-Belanja Tidak Langsung -Belanja Pegawai	Semua SKPD
-Belanja Langsung -Belanja Pegawai -Belanja Barang dan Jasa -Belanja Modal	Semua SKPD

2.4 Tantangan dan Peluang

- Bagian ini mengemukakan hasil analisis Renstra SKPD provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan SKPD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

Analisis Renstra

- apakah capaian sasaran pelaksanaan Renstra SKPD kabupaten/kota telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra SKPD provinsi dan Renstra K/L; dan
- apakah tingkat capaian kinerja Renstra SKPD kabupaten/kota melebihi/sama/kurang dari sasaran Renstra SKPD provinsi atau Renstra K/L.

Analisis RTRW

- Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan SKPD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka SKPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan SKPD dalam lima tahun mendatang.

Akhir Bab 2

Untuk Bab 2, fokus utama adalah pada tabel 2.1 dan 2.2 yg wajib diisi oleh semua

BAB 3.

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan pelayanan SKPD dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

- Tugas dan fungsi SKPD yang terkait dengan visi, misi, serta program KDH/WKDH terpilih.
- Memaparkan apa saja faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi KDH/WKDH

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

Mengemukakan apa saja faktor penghambat ataupun faktor pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra SKPD provinsi/kabupaten/kota.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

mengemukakan apa saja faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Review kembali faktor dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari:

- ▣ gambaran pelayanan SKPD;
- ▣ sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
- ▣ sasaran jangka menengah dari Renstra SKPD provinsi/kabupaten/kota;
- ▣ implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD; dan
- ▣ implikasi KLHS bagi pelayanan SKPD


Selanjutnya dikemukakan :

- Metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut.
- Isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra SKPD tahun rencana.

Kriteria Isu Strategis

- Isu-isu strategis dirumuskan berdasarkan hasil identifikasi isu-isu strategis yang terdapat dalam rancangan awal RPJMD yang disesuaikan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD dalam memberikan pelayanan publik, telaahan terhadap rencana tata ruang, Renstra Kementerian/Lembaga/Renstra SKPD provinsi.
- Penentuan fakta dan permasalahan menjadi isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :

Bagan 5.1 Kriteria Isu-isu Strategis



Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pelayanan publik dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah

Merupakan tugas dan tanggung jawab SKPD

Sejalan dengan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah

Adanya kemungkinan/peluang untuk ditangani

Memiliki daya ungkit untuk pencapaian visi misi kepala daerah

Akhir Bab 3

Fokus Bab 3 ini adalah isu strategis yang diangkat, harus dapat ditangani dalam 5 tahun, untuk mendukung pencapaian visi dan misi KDH/WKDH

Bab 4 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

PERUMUSAN VISI DAN MISI SKPD

4.1 Visi dan Misi SKPD

VISI : rumusan umum tentang kondisi masa depan yg ingin dicapai SKPD melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD

- Dapat dibayangkan oleh seluruh pemangku kepentingan pelayanan SKPD
- Memiliki nilai yg memang diinginkan/dicita-citakan
- Layak utk dicapai dgn situasi, kondisi dan kapasitas yg ada
- Dirumuskan dg suatu pernyataan yg singkat jelas dan padat

PERUMUSAN VISI DAN MISI SKPD

MISI : rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi SKPD

- ✦ Menunjukkan dg jelas upaya2 yg akan dilaks oleh SKPD dlm rangka mewujudkan visi SKPD
- ✦ Memperhatikan faktor2 lingk strategis eksternal dan internal daerah
- ✦ Menggunakan bahasa yg ringkas, sederhana dan mudah dipahami

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

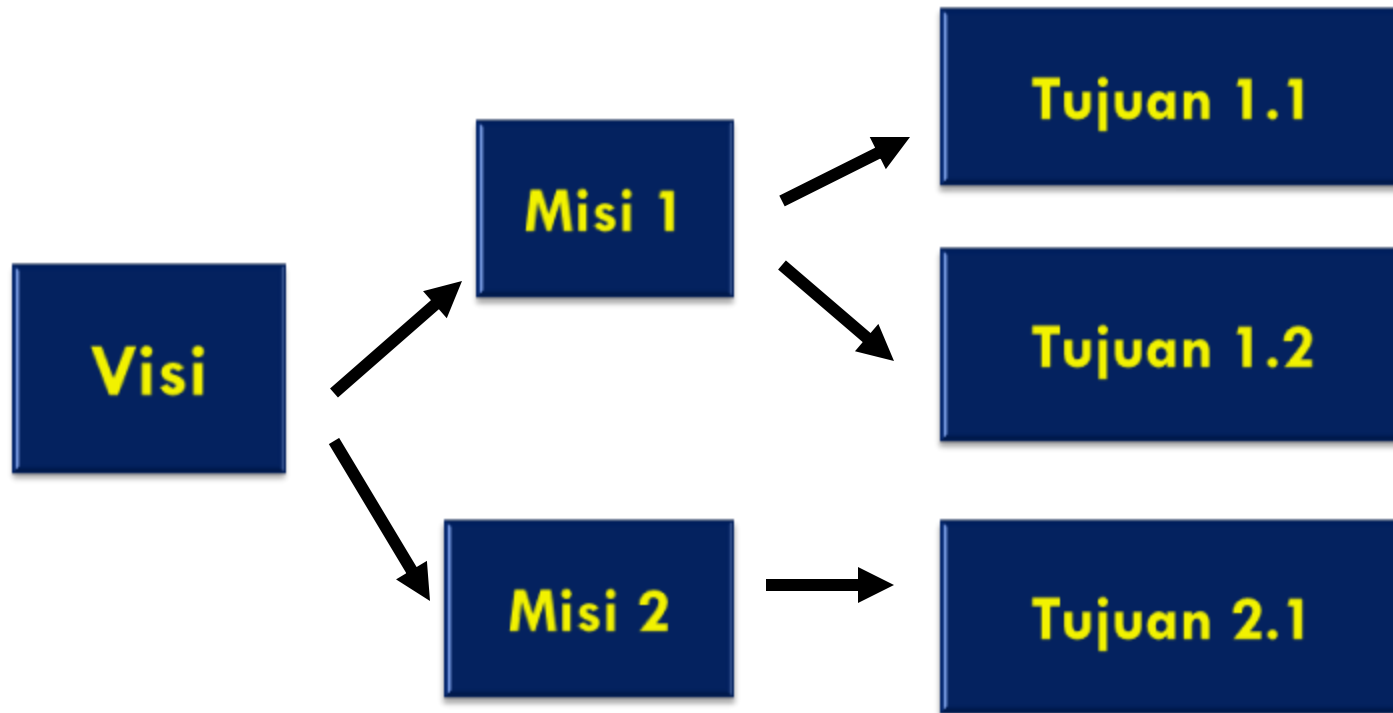
Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

4.3 Strategi dan Kebijakan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang

Visi, Misi dan Tujuan



arah

upaya pencapaian visi

*kondisi yang ingin
dicapai
(spesifik & terukur)*

Kertas Kerja:

Perumusan Visi-Misi-Tujuan SKPD

Visi	Misi	Tujuan & Sasaran
	1.	1.1
		1.2
	2.	2.1
		2.2
		2.3
	3.	3.1
	4.	4.1
		4.2
		4.3

Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih (RPJMD)

Visi Kepala Daerah (RPJMD) :

Terwujudnya Lembata yang bersih, produktif dan mandiri
Berbasis Potensi lokal dalam Perspektif Tata Ruang pada
Tahun 2016

Misi (Agenda Perjuangan) :

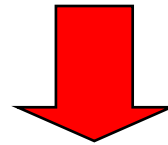
- 1) Reformasi birokrasi
- 2) **Peningkatan Kualitas SDM**
- 3) Recovery ekonomi wilayah
- 4) peningkatan pendapatan daerah
- 5) pembangunan infrastruktur
- 6) Penataan ruang berwawasan lingkungan.

CONTOH

Visi Kepala Daerah Terpilih (RPJMD) dan Visi SKPD

Visi KDH
(RPJMD)

Terwujudnya Lembata yang bersih,
produktif dan mandiri Berbasis Potensi
lokal dalam Perspektif Tata Ruang pada
Tahun 2016



Visi SKPD
(Renstra
SKPD)

DINAS KESEHATAN :
Terwujudnya SDM yang sejahtera
melalui akses dan layanan kesehatan
yang bermutu

PERUMUSAN TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

TUJUAN :

- Pernyataan tentang hal-hal yg perlu dilakukan utk mencapai visi dan melaksanakan misi
- Biasanya disusun dgn membalikkan pernyataan isu/permasalahan menjadi suatu kalimat positif yg ringkas

SASARAN :

- Hasil yg diharapkan dari suatu tujuan yg diformulasikan secara terukur spesifik, mudah dicapai dan rasional utk dpt dilaksanakan.

PERUMUSAN TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

STRATEGI :

- Pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai

KEBIJAKAN :

Pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Misi 1: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan yang terjangkau dan menjangkau masyarakat

Tujuan 1.1: Meningkatkan Akses Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin

Sasaran 1.1.1: **Meningkatnya masyarakat miskin baik di desa maupun perkotaan yang dilayani pelayanan kesehatan dari 50% menjadi 100%**

Sasaran 1.1.2: Meningkatkan jumlah masyarakat kabupaten . . . yang dilayani oleh sarana prasarana kesehatan dari 70% menjadi 100%

Sasaran 1.1.1: Meningkatnya masyarakat miskin baik di desa maupun perkotaan yang dilayani pelayanan kesehatan dari 50% menjadi 100%

Strategi :

- 1) Memberikan subsidi pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin
- 2) Menambah jumlah puskesmas dan polindes
- 3) Menambah jumlah tenaga kesehatan di desa

Strategi :

Memberikan subsidi pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin

Kebijakan:

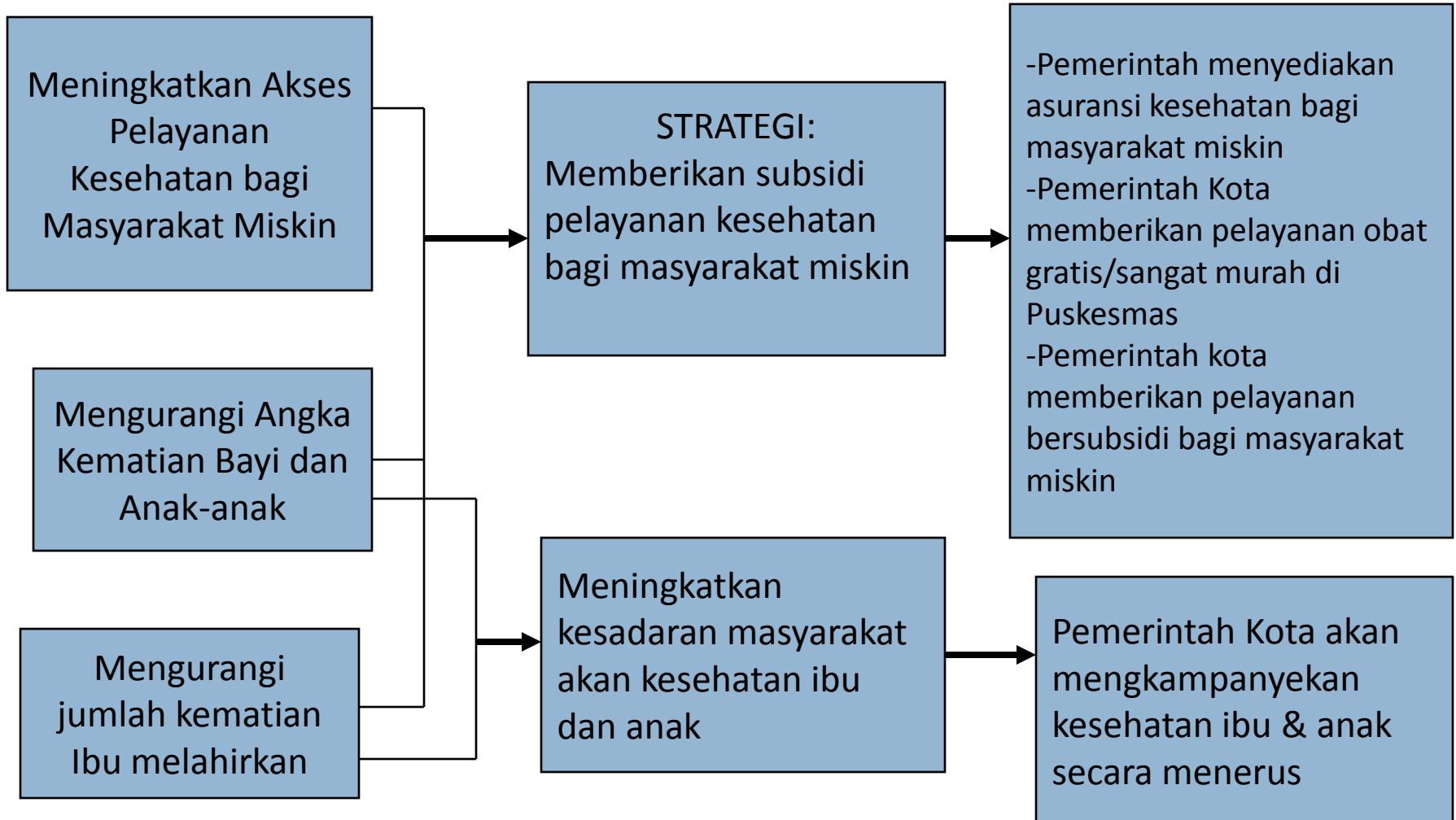
- 1) Pemerintah menyediakan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin
- 2) Pemerintah memberikan pelayanan obat gratis/sangat murah di Puskesmas
- 3) Pemerintah memberikan pelayanan bersubsidi bagi masyarakat miskin

Contoh Tujuan, Strategi dan Kebijakan

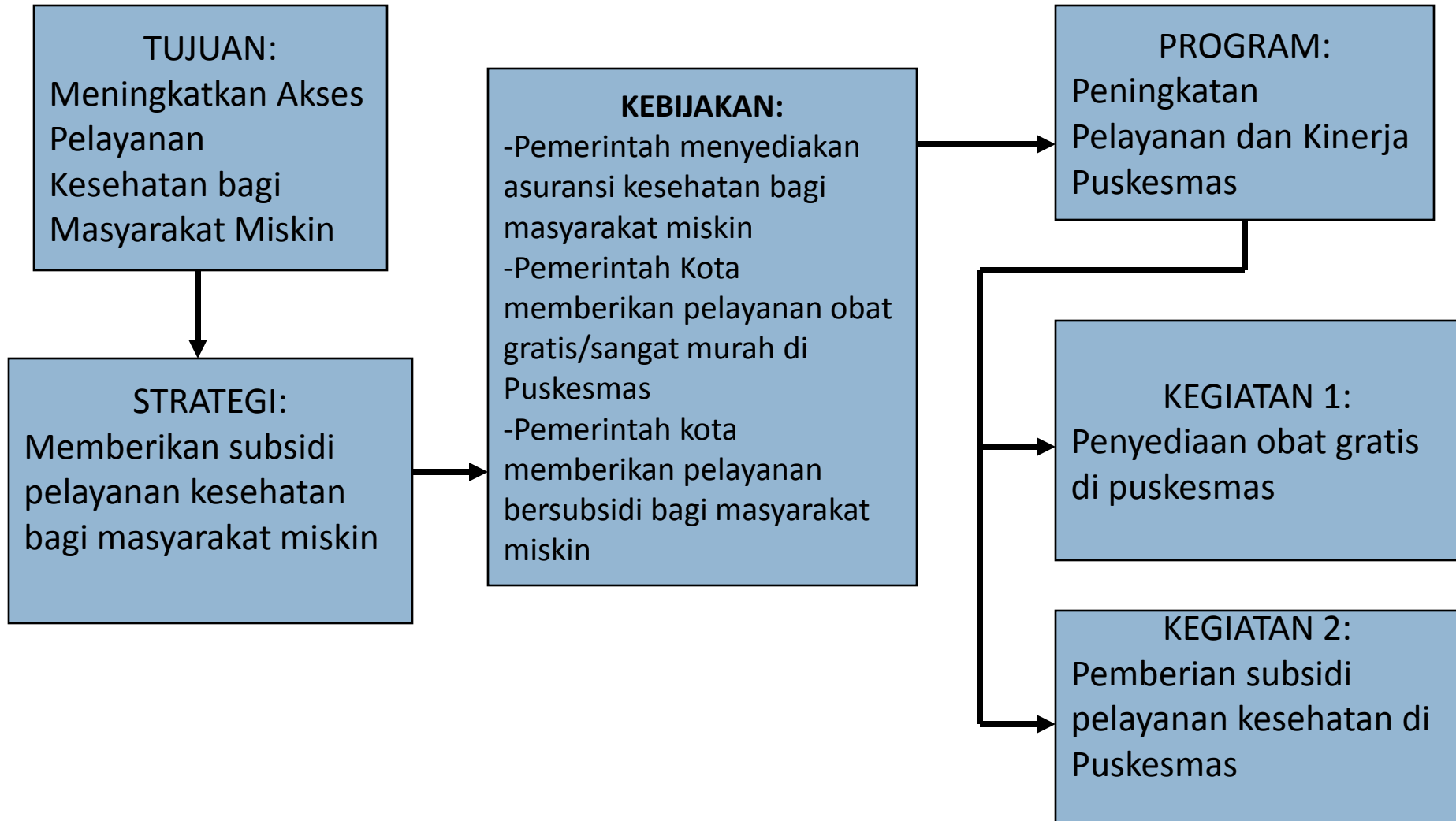
TUJUAN

STRATEGI

KEBIJAKAN



Contoh Program:



Akhir BAB 4

BAB 5. INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPDYANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD



TERIMA KASIH
SELAMAT MENYUSUN DRAFT RENSTRA SKPD

If you fail to plan, you plan to fail

(anonymous)



